

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki banyak suku bangsa yang tersebar dari sabang sampai merauke. Keunikan tersebut menjadi nilai tersendiri untuk kemajuan bangsa Indonesia karena masyarakat Indonesia dituntut saling menyesuaikan diri dengan etnis lain sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia semakin dinamis. Secara umum penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian sebagai petani, hal ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang mengakibatkan Indonesia hanya memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Dengan kekayaan alam dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia khususnya tanah karo sehingga bangsa luar berkeinginan menawarkan kerjasama.

Keinginan bangsa luar untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia awalnya dimulai dengan perdagangan, tetapi pada akhirnya bangsa lain khususnya bangsa Eropa merasa bahwa Indonesia adalah salah satu aset yang sangat potensial penghasil rempah-rempah, tembakau dan hasil pertanian lainnya yang memiliki nilai tinggi dalam perdagangan Eropa maka kerjasama berubah menjadi penguasaan atas wilayah dan kekayaan alam yang ada.

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara yang terletak di daerah pegunungan sehingga memiliki kesuburan tanah yang cukup tinggi hal ini memiliki ketertarikan bangsa Belanda untuk menduduki daerah tersebut. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik. Kabupaten Karo mengalami berbagai perubahan struktur pemerintahan yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang berada disana sehingga perubahan ini terjadi ketika

kedatangan Belanda membawa pengaruh dari berbagai elemen baik dari masyarakat juga pemerintahan yang semula berasal dari kekerabatan hingga berubah menjadi yang sistem kerajaan.

Sistem pemerintahan yang dilakukan oleh tokoh adat di tanah karo sebelum kedatangan Belanda yakni pertama yang berhak untuk mewarisi jabatan Perbapaan Urung atau Pengulu ialah anak tertua, kalau dia berhalangan, maka yang paling berhak adalah anak yang termuda/bungsu. Sesudah kedua golongan yang berhak tadi itu, yang berhak adalah anak nomor dua yang tertua, kemudian anak nomor dua yang termuda. Orang yang berhak dan dianggap sanggup menjadi Perbapaan Urung tetapi karena sesuatu sebab menolaknya, maka dengan sendirinya hilang haknya dan berhak keturunannya yang menjadi Perbapaan/Raja Urung. Hal ini juga menurut P. Tambun dalam bukunya merupakan adat baru. Maksudnya adalah untuk menjaga supaya pemangkuan Perbapaan yang dilaksanakan oleh orang lain hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa. Sementara itu orang yang berhak menurut adat menjadi Perbapaan/Raja, tetapi masih dalam keadaan di bawah umur ataupun belum kawin, maka jabatan itu boleh dipangku/diwakili kepada orang lain menunggu orang yang berhak itu sudah mencukupi. Peraturan tetap tentang memilih siapa sebagai pemangku itu tidak ada. Yang sering dilakukan ialah orang yang paling cakap diantara kaum sanak keluarga terdekat, termasuk juga Anak Beru dan marga yang seharusnya memerintah sebagai Perbapaan Raja.

Awal masuknya bangsa asing sebagai penjajah ke Indonesia di mulai sekitar tahun 1500-an yaitu bangsa Portugis dengan misi 3G yakni: Gold, Glory dan Gospel. Dengan masuknya bangsa lain untuk menjajah bangsa Indonesia sangat mempengaruhi kebiasaan hidup suku-suku bangsa di Indonesia, sehingga hampir semua aspek kehidupan mengalami transformasi (perubahan). Perubahan ini tidak serta merta diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga terjadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

Beberapa perubahan yang secara signifikan terjadi pada mulai dikenalnya sistem pembagian wilayah untuk memudahkan pemerintahan kolonial dalam mengawasi sistem pemerintahan yang sedang berlangsung sekaligus memudahkan untuk memanipulasi perdagangan. Penyebaran agama kristenpun mulai dilakukan oleh kolonial sehingga banyak rakyat di tanah jajahan Belanda memeluk agama kristen

Masuknya kolonialisme yang terjadi di Sumatera Timur mengakibatkan keruntuhan kejayaan kerajaan-kerajaan yang berkuasa dan memunculkan pemberontakan di daerah khususnya di Tanah Karo sehingga sangat mempengaruhi semua elemen kehidupan masyarakat Karo termasuk keadaan pemerintahan karu. Pembagian wilayah yang terjadi di Sumatera Timur yakni kresidenan dan afdeling dengan tujuan memudahkan penjajahan Belanda mengawasi wilayah yang dikuasainya.

Dalam hal ini wilayah dataran Tinggi Tanah Karo dan Simalungun oleh pemerintah Belanda masuk dalam wilayah administrasi Simalungun dan karu landen, dipimpin oleh Asisten Residen Belanda dan pusat pemerintahannya adalah Pematang Siantar. Administrasi simalungun dan karu landen yang merupakan satu afdeling termasuk dalam kresidenan Sumatera Timur dengan ibukota Medan. Pemerintah Belanda membagi bagian wilayah pemerintahannya yakni swaparja pribumi/ landschaap. Pemerintah Swapraja merupakan alat perpanjangan tangan dari pemerintahan jajahan Belanda menguasai penduduk pribumi dalam berbagai aspek keperluan penjajahan.

Di daerah administrasi Onderafdeling Karu Landen yang dipimpin seorang kontlik Belanda, terdapat pemerintahan swapraja pribumi tingkat kerajaan yang dipimpin oleh Sibayak dan Kerajaan Urung yang dipimpin oleh Raja Urung. Pemerintahan swapraja pribumi Landschaap yang dikepalai oleh Sibayak di Tanah Karo terdiri dari 5 Kerajaan dengan 18 kerajaan Urung yang merupakan pemerintahan pribumi baawahan atau bagian dari kerajaan Landschaap.

Adapun pemerintahan swaparaja bumi/Landschaap yang dikepalai Sibayak adalah sebagai berikut:

1. Landschaap Lingga berkedudukan di Lingga kemudian ke Kabanjahe, membawahi 6 kerajaan urung
2. Landschaap Sarinembah berkedudukan di Sarinembah, 4 kerajaan urung.
3. Landschaap Barusjahe berkedudukan di Barusjahe, 2 kerajaan urung.
4. Landschaap Suka berkedudukan di Suka, 4 Kerajaan urung.
5. Landschaap Kutabuluh berkedudukan di Kutabuluh, 2 Kerajaan urung.

Setiap kerajaan membawahi beberapa kerajaan urung seperti halnya kerajaan lingga membawahi 4 kerajaan urung yang keseluruhannya itu menjadi tanggung jawab raja lingga memimpin wilayah dan melakukan pengembangan ataupun perluasan wilayah. Dan setelah kemerdekaan Indonesia seluruh kerajaan yang ada di Indonesia khususnya yang berada di Kabupaten Karo mengalami perubahan secara menyeluruh.

Dengan perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Tanah Karo yang awalnya dipimpin oleh seorang penghulu yang dipilih berdasarkan usia sehingga kedatangan Belanda membawa perubahan bagi masyarakat Tanah Karo dan membentuk kerajaan dalam hal ini kerajaan Lingga sehingga mengalami perkembangan dengan membawahi 4 kerajaan urung.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Perubahan Struktur Pemerintahan Karo Tahun 1882-1945.”

1.2. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini dapat berjalan terarah, maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sistem pemerintahan sebelum kedatangan Belanda di Tanah Karo
2. Struktur pemerintahan Kabupaten Karo tahun 1882-1945
3. Perkembangan pemerintahan Kabupaten Karo setelah tahun 1945

1.3. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemerintahan sebelum kedatangan Belanda di Tanah Karo?
2. Bagaimana struktur pemerintahan Kabupaten Karo 1882-1945?
3. Bagaimana perkembangan pemerintahan Kabupaten Karo tahun 1945?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pemerintahan sebelum kedatangan Belanda di Tanah Karo
2. Untuk mengetahui struktur pemerintahan Kabupaten Karo 1882-1945
3. Untuk mengetahui perkembangan pemerintahan Kabupaten Karo setelah tahun 1945.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat:

1. Untuk menambah pengetahuan pembaca tentang sistem pemerintahan sebelum kedatangan Belanda di Tanah Karo.
2. Untuk memberikan informasi, khususnya kepada masyarakat Tanah Karo tentang struktur pemerintahan Kabupaten Karo 1882-1945. Dengan demikian diharapkan semua elemen masyarakat agar sama-sama dapat memajukan pemerintahan di tanah karo.
3. Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan umumnya dan khususnya kepada jurusan pendidikan sejarah unimed.
4. Sebagai bahan informasi kepada akademisi, pemerintahan, maupun masyarakat umum.